



Belum Siap Terapkan Desentralisasi Sampah

■ Pemkot Yogya Operasionalkan TPS Kranon Pekan Ini

YOGYA, TRIBUN - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yogyakarta menyuarakan keprihatinan mereka atas minimnya dukungan pemerintah dalam pengelolaan sampah dari hulu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kurangnya dukungan ini, dinilai menjadi hambatan utama dalam mencapai pengelolaan sampah yang optimal di wilayah tersebut.

Kadiv Kampanye Walhi Yogyakarta, Elki Setyo Hadi, menyatakan bahwa pengelolaan sampah di DIY perlu ditangani secara serius dan holistik. Desentralisasi pengelolaan sampah ke kabupaten/kota, meskipun langkah yang tepat, tidak diiringi dengan infrastruktur yang memadai.

"Desentralisasi itu bagus. Tapi, apakah setiap kabupaten/kota sudah siap dengan infrastruktur dan model pengawasannya?," ujar Elki, kemarin (15/5).

Elki mencontohkan TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) Nitiikan di Kota Yogyakarta yang awalnya diperuntukkan bagi kecamatan, namun akhirnya digunakan oleh seluruh kota. Kapasitas TPS 3R tersebut tidak mampu menampung volume sampah yang besar, sehingga pengelolaan sampah menjadi tidak optimal.

Menurut Elki, solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan sampah adalah dengan

memulai dari hulu, yaitu dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Namun, kendala seperti minimnya infrastruktur pendukung dan insentif membuat masyarakat tidak dapat mengelola sampah secara konsisten.

"Masyarakat sebenarnya bisa memilah sampah, tapi mereka membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk infrastruktur, sumber daya, dan insentif," jelas Elki.

Elki menambahkan bahwa model-model pengolahan sampah yang ada saat ini masih bersifat percontohan dan belum diterapkan secara luas. Diperlukan skema yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan sampah di DIY.

"Infrastruktur ini gak cuma bangunan, juga bagaimana sumber daya, support, insentif atau apa gitu seharusnya ada skema seperti itu. Karena kalau dilihat selama ini beberapa kayak model pengolahan percontohan saja," urainya.

Pengelolaan

Sementara itu, Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Kranon yang disiapkan Pemkot Yogya rencananya bisa dioperasikan mulai pekan ini. Nantinya, lokasi tersebut ditargetkan bisa menerima dan mengelola alokasi sampah dari warga masyarakat hing-

HAMBATAN UTAMA

- Walhi Yogyakarta sebut minimnya dukungan pemerintah dalam pengelolaan sampah dari hulu di DIY.
- Kurangnya dukungan ini menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sampah.
- Desentralisasi pengelolaan sampah ke kabupaten/kota belum siap diterapkan.
- Pemkot Yogya segera operasionalkan TPS Kranon pekan ini.

ga 45 ton per hari.

Kepala Bidang Pengolahan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya, Ahmad Haryoko, mengatakan, bahwa proses uji coba pun sudah dilakukan di TPS Kranon. Namun, ia tidak memungkiri, bangunan yang tersedia masih mengalami kendala saat hujan deras, di mana mesin pengolah sampah belum terlindungi penuh.

"Sehingga, kita harus melindungi mesin-mesinnya dulu, biar aman dari hujan, karena kemarin belum 100 persen terlindungi, meski sudah uji coba," katanya, Rabu (15/5).

"Makanya, kami berpikir, kalau dipaksakan, terus hujan lagi malah semakin parah. Jadi, kami perbaiki dulu, insyaallah minggu ini tetap bisa operasional," tambah Haryoko.

Hal tersebut, tentu menjadi angin segar bagi Kota Yogyakarta, lantaran sekarang baru TPS Nitiikan saja yang

dapat dioperasikan secara penuh. Sementara, TPS Karangmiri yang perombakannya mendapat porsi lebih banyak, kemungkinan baru bisa beraktivitas pada kirsaran awal Juni 2024.

"Karangmiri memang masih agak lama, karena akses jalan belum terkonkondisi dengan baik. Nanti, (kuota) di sana hanya 35 ton, karena kondisi akses jalan itu dan kemungkinan masih Juni," jelasnya.

Sembari menanti kesiapan dua TPS tersebut, Haryoko menyampaikan, bahwa pihaknya masih berupaya mengoptimalkan TPS Nitiikan. Menurutnya, meski belum optimal, kuota pengolahan di lokasi itu perlahan mulai mendekati target 75 ton per hari yang dicanangkan DLH.

"Di Nitiikan sudah jalan 73 ton, dari target 75 ton, kurang dua ton lagi. Sekarang coba kita memenej jannya, kita pres sedikit lagi supaya bisa 75 ton setiap harinya," ungkapnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005